

Model Manajemen Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Good Governance dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Sabri¹, Eka Febrianti², Asnah³, Rika Novita Sari⁴

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi Sumatera Barat, Indonesia

sabrisimabur@gmail.com¹, ekafebriantiardi78@gmail.com², asnahanas81@gmail.com³,
rikanovitasari123@gmail.com⁴

Kata Kunci:

Good Governance,
Pembangunan Berkelanjutan,
Digital Government,
Collaborative Governance,
Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan (*Good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Good Governance* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta merumuskan model konseptual yang mampu mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) melalui identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis terhadap berbagai artikel ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi hubungan antarkonsep dan menyusun model konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi menuju *Digital Government* terbukti meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik, sedangkan *Collaborative Governance* memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan Sustainable Development Governance Model (SDGM) sebagai kebaruan (*novelty*) yang mengintegrasikan *Good Governance*, *Digital Government*, *Collaborative Governance*, dan *Sustainable Development* dalam satu kerangka konseptual untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Model ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori manajemen pembangunan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Abstract

Key Word:

Good Governance,
Sustainable Development,
Digital Government,
Collaborative Governance,
Community Welfare

Sustainable development has become a paradigm that emphasizes balancing economic growth, social equity, and environmental sustainability to improve community welfare. The success of development depends not only on the availability of resources but also on the quality of governance. This study aims to analyze the role of Good Governance in supporting sustainable development and to formulate a conceptual model integrating governance, digital transformation, and cross-sector collaboration to enhance community welfare in Indonesia. This study employed a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method to identify, select, evaluate, and synthesize relevant scientific articles, books, and policy documents. Data were analyzed using content analysis to identify relationships among concepts and develop a conceptual framework. The findings indicate that the implementation of Good Governance principles, including transparency, accountability, public participation, effectiveness, efficiency, and the rule of law, significantly improves public service quality, strengthens public trust, encourages investment, and promotes sustainable economic growth. Furthermore, Digital Government enhances bureaucratic efficiency, transparency, and public service accessibility, while Collaborative Governance strengthens collaboration among government, the private sector, academia, the media, and society in achieving sustainable development goals. Based on theoretical synthesis and previous studies, this research proposes the Sustainable Development Governance Model (SDGM) as its novelty, integrating Good Governance, Digital Government, Collaborative Governance, and Sustainable Development into a comprehensive conceptual framework. The proposed model is expected to advance development management theory and provide practical policy recommendations to achieve sustainable community welfare in Indonesia.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan hidup (Hidayat & Mukhlisin, 2020; Setyawan, 2013; Sukmawati & Purbawangsa, 2016; Tahir, 2018). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan tidak lagi dipandang hanya sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga sebagai proses multidimensional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2021). Paradigma tersebut semakin menguat sejak disepakatinya Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang menempatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Indonesia telah mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai program strategis pemerintah, seperti digitalisasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, merupakan bagian dari implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan publik, korupsi, birokrasi yang belum sepenuhnya efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas (OECD, 2021) (Intezar & Zia, 2020; Khansa & Violita, 2021; Rezende et al., 2018; Wahyudi et al., 2025).

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan (*Good governance*). Konsep *Good Governance* berkembang sebagai paradigma administrasi publik modern yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2021). Pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam beberapa tahun terakhir, implementasi *Good Governance* semakin diperkuat melalui transformasi digital dalam pemerintahan (*digital government*). Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, integrasi antara *Good Governance* dan transformasi digital menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara *good governance* dan pembangunan. Penelitian Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, studi OECD (2021) menegaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan positif dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan efisiensi birokrasi (OECD, 2021).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas *Good Governance*, pembangunan berkelanjutan, *digital government*, dan *collaborative governance* secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan keempat konsep tersebut ke dalam satu model manajemen pembangunan yang komprehensif masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum tersedianya model konseptual yang menjelaskan hubungan sistematis antara prinsip *Good Governance*, transformasi digital, tata kelola kolaboratif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan suatu model konseptual yang dinamakan Sustainable Development Governance Model (SDGM). Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Governance*, *digital government*, dan *collaborative governance* sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen pembangunan sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih

adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Good Governance* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi keterkaitan antara tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, serta merumuskan model manajemen pembangunan yang dapat diterapkan dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia.

Manajemen masyarakat merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya masyarakat guna mencapai tujuan masyarakat secara efektif dan efisien. Menurut Todaro dan Smith (2021), masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif administrasi masyarakat, manajemen masyarakat menjadi masyarakat penting bagi pemerintah dalam mengelola berbagai program masyarakat agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Keberhasilan manajemen masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas kebijakan masyarakat, dan tata masyarakat pemerintahan yang baik (Fadhilurrahman et al., 2024; Millatina et al., 2019; Putri et al., 2022; Suparmoko, 2020).

Konsep *Good Governance* berkembang sebagai paradigma baru dalam administrasi masyarakat yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta menjunjung supremasi hukum. Menurut Mardiasmo (2021), penerapan prinsip *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (Hasan et al., 2022, 2025; Nor & Yaakub, 2017).

OECD (2021) menjelaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Prinsip-prinsip utama *Good Governance* meliputi: transparansi; akuntabilitas; partisipasi masyarakat; efektivitas dan efisiensi; responsivitas; penegakan hukum (rule of law); kesetaraan; dan visi strategis.

Konsep masyarakat berkelanjutan mulai dikenal secara luas sejak diterbitkannya Brundtland Report pada tahun 1987, dan kemudian diperkuat melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (2015), masyarakat berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi pelestarian lingkungan. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan seimbang agar masyarakat dapat memperoleh manfaat jangka panjang.

Collaborative Governance merupakan pendekatan tata kelola yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan pemerintah. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah.

Dalam konteks masyarakat berkelanjutan, kolaborasi menjadi penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara lebih efektif.

Berdasarkan sintesis teori, penelitian ini mengembangkan Sustainable Development Governance Model (SDGM) yang menempatkan *Good Governance* sebagai fondasi utama masyarakat berkelanjutan. Model tersebut mengintegrasikan tata masyarakat pemerintahan, transformasi digital, dan kolaborasi lintas sektor sebagai masyar yang memengaruhi keberhasilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Model konseptual ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori manajemen masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan masyarakat yang lebih efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen masyarakat berkelanjutan, *Good Governance*, *Digital Government*, *Collaborative Governance*, serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Snyder, Hannah (2019), *Systematic Literature Review* merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan kerangka konseptual melalui sintesis berbagai penelitian terdahulu. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan teori yang telah ada, tetapi juga mengintegrasikan berbagai konsep untuk menghasilkan model konseptual baru yang relevan dengan konteks masyarakat di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, antara lain: artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan organisasi internasional. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2020–2025, sehingga mampu menggambarkan perkembangan terkini mengenai tata asar pemerintahan dan masyarakat⁴⁹ berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Identifikasi Literatur, Literatur diperoleh melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Emerald Insight, SpringerLink, serta portal Garuda. Seleksi Literatur, Artikel dipilih berdasarkan beberapa kriteria: membahas Good Governance; berkaitan dengan masyarakat⁴⁹ berkelanjutan; menjelaskan Digital Government; menjelaskan Collaborative Governance; membahas kesejahteraan masyarakat. Evaluasi Literatur, seluruh artikel dianalisis berdasarkan: tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan implikasi kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Content Analysis melalui 4 tahapan. Reduksi data, literatur yang tidak relevan dieliminasi sehingga hanya artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dianalisis. Kategorisasi. Literatur dikelompokkan menjadi beberapa tema, yaitu: Good Governance; Sustainable Development; Digital Government; Collaborative Governance; Community Welfare. Sintesis Literatur. Tahap ini mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh hubungan antarvariabel. Penyusunan Model Konseptual. Hasil sintesis digunakan untuk membangun Sustainable Development Governance Model (SDGM) sebagai kontribusi utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas mendorong pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik. Sedangkan partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan.



Temuan ini sejalan dengan penelitian OECD (2021) yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memiliki hubungan positif dengan efektivitas pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran Digital Government dalam Mendukung Good Governance

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan digital (Digital Government). Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia layanan konvensional, tetapi juga sebagai penyedia layanan berbasis teknologi digital.



Digitalisasi pelayanan publik memberikan berbagai manfaat, antara lain: mempercepat proses pelayanan; meningkatkan transparansi; mengurangi biaya administrasi; meningkatkan akuntabilitas; memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, transformasi digital menjadi instrumen penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Collaborative Governance dalam Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, media, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. Pendekatan ini dikenal sebagai Collaborative Governance. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai sumber daya dapat diintegrasikan sehingga pembangunan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.



Hubungan Good Governance terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara implementasi *Good Governance* dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan daya saing daerah maupun nasional.

Sustainable Development Governance Model (SDGM)

Berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan model konseptual baru yang disebut Sustainable Development Governance Model (SDGM). Model tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* menjadi dasar dalam membangun pemerintahan digital. Pemerintahan digital selanjutnya memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan sehingga pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Integrasi seluruh komponen tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Model ini merupakan kebaruan (novelty) penelitian karena mengintegrasikan empat pendekatan utama—*Good Governance*, *Digital Government*, *Collaborative Governance*, dan *Sustainable Development*—ke dalam satu kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen pembangunan melalui pengembangan model konseptual SDGM yang mengintegrasikan berbagai pendekatan tata kelola modern. Model tersebut memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan, transformasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan pembangunan berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi prinsip *Good Governance*, mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi *Digital Government* memberikan kontribusi penting dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, sementara *Collaborative Governance* memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui pengembangan *Sustainable Development Governance Model (SDGM)*, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan digital, kolaborasi multipihak, dan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang inklusif, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Fadhlurrahman, M., Wideasanti, I., & Septiandini, E. (2024). Analisis manajemen konstruksi pada pembangunan gudang PT. PJPT Senopati. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1405–1411.
- Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Bt. Siraj, S. A. (2022). Building trust in waqf management—Implications of good governance and transparent reporting. *The Singapore Economic Review*, 67(1), 459–475.
- Hasan, R., Faruq Ahmad, A. U., & Siraj, S. A. (2025). Building trust in waqf management—Implications of good governance and transparent reporting. 1–17. https://doi.org/10.1142/9789819813735_0001
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis pertumbuhan zakat pada aplikasi zakat online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Intezar, M. T., & Zia, S. Bin. (2020). *Zakat, SDGs, and poverty alleviation of Muslims in India* (pp. 1–20). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch001>
- Khansa, F. N., & Violita, E. S. (2021). The association between Islamic bank performance and Islamic social responsibility in supporting SDGs: The difference between Indonesia and Malaysia. In H. Herdiansyah (Ed.), *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 716, Issue 1). IOP Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012062>
- Millatina, A. N., Hakimi, F., Zaki, I., & Yuningsih, I. (2019). Peran pemerintah untuk menumbuhkan potensi pembangunan pariwisata halal di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 96–109.
- Nor, S. B. M., & Yaakub, N. I. (2017). Educational endowments governance for institutions of higher education in Malaysia: A preliminary study. *Advanced Science Letters*, 23(1), 589–591. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7266>
- Putri, T. A. N. E., Sakti, R. J. N., & others. (2022). Studi kelayakan proyek pembangunan perumahan A di Kota Malang. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)*, 3(4), 99–106.
- Rezende, J. F. D., Lago, D. M., & Teles, V. J. (2018). Observing the sustainable development goals (SDGs) in Mars analog habitats. *Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC, 2018-October*.
- Setyawan, D. (2013). Analisis hubungan ijtihad dan tajdid pemikiran ekonomi terhadap (Studi kasus pada amal usaha organisasi masyarakat Muhammadiyah). *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 105–134.

- Sukmawati, N., & Purbawangsa, I. (2016). Pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, risiko kredit, likuiditas, dan kondisi ekonomi terhadap profitabilitas. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 248723.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Tahir, K. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(2), 110–132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1440550>
- Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. M. (2025). Islamic social finance as a catalyst for SDGs: A systematic analysis of implementation models and digital innovation. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 54–70. <https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.37591>